

# **PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DI KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA**

**Yupiter Weya  
NIM : 090814023**

**Dosen Pembimbing :  
1. Dr. Drs. A. B. Pati, MSi  
2. Drs. R. J. D. Sumampouw, MSi**

## **ABSTRACT**

Di setiap negara atau daerah yang sedang melaksanakan pembangunan sudah tentu banyak menghadapi berbagai masalah seperti politik, sosial, ekonomi, keamanan, kesejahteraan dan lain sebagainya.

Masalah kebijakan yang nantinya akan diimplementasikan atau dilaksanakan kepada masyarakat tentunya ada proses evaluasi, seperti banyak negara-negara yang sudah maju mulai menyadari akan setiap proses pelaksanaan pembangunan, baik dalam proses perumusan, pelaksanaan maupun dalam proses evaluasi kebijakan. Permasalahan yang muncul adalah Bagaimana partisipasi politik masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua? Dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua?.

Pemerintah juga dituntut untuk "memperhatikan masalah-masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat, baik itu masalah pelestarian lingkungan maupun masalah hak-hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam kaitan dengan penelitian ini penulis tertarik membahas tentang Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini digambarkan dengan kalimat menurut kategorinya untuk disimpulkan, apabila ada data yang berupa angka- angka hasil perhitungan akan diproses berdasarkan: dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan hasilnya diprosentasekan

Dengan demikian, pendidikan politik masyarakat pada dasarnya untuk menciptakan suatu keberadaan bangsa yang beradab, dimana dalam pergaulan hidup antar sesama generasi muda sebagai anggota masyarakat terdapat rasa kasih sayang, hormat menghormati, bantu membantu atau tolong menolong, mengetahui akan hak dan tanggung jawab masing-masing menjunjung tinggi hukum, memulainya agama, luhur budinya' Ini karena di dukung oleh moral yang luhur dan baik, yaitu Moral Pancasila, dimana tingkah laku lahiriah di dalam masyarakat.

**Key words : Partisipasi Politik, Kebijakan Pemerintah, Peranan Pemerintah**

## ▪ **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah kebijakan yang nantinya akan diimplementasikan atau dilaksanakan kepada masyarakat tentunya ada proses evaluasi, seperti banyak negara-negara yang sudah maju mulai menyadari akan setiap proses pelaksanaan pembangunan, baik dalam proses perumusan, pelaksanaan maupun dalam proses evaluasi kebijakan. Pemerintah juga dituntut untuk "memperhatikan masalah-masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat, baik itu masalah pelestarian lingkungan maupun masalah hak-hak asasi manusia. Konotasi atau masalah pembangunan (development) tidak lagi semata-mata dilihat sebagai persoalan perbaikan (improvement) khususnya persoalan struktur ekonomi masyarakat, semisal penciptaan kemakrnuran apabila kebijakan-kebijakan tersebut tidak dibarengi dengan proses evaluasi. Bila pendapat diatas dikaitkan dengan pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten, maka kebijakan pemerintah di Kabupaten mempunyai peranan yang sangat penting terhadap akselerasi (pelaksanaan atau implementasi) dari pada proses pembangunan.

Bahwa kabupaten tolikara memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan menjeluruh yang akan di lakukan bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimanakan Undang-Undang Dasar 1945.

Dapat dikatakan demikian karena pemerintah Kabupaten yang salah satu fungsinya adalah sebagai pemotivasi dalam pelaksanaan pembangunan, diharapkan mampu mengembangkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan dari pada proses pembangunan yang ada di wilayahnya lewat kebijakan-kebijakan yang akan diimplementasikan atau yang akan dilaksanakan. Diperlukan kepedulian aktif atau keterlibatan langsung dari seorang Bupati dalam memberikan seruan-seruan kepada masyarakat atau setidaknya dapat mengingatkan kepada masyarakat bahwa pembangunan itu adalah untuk kepentingan masyarakat juga sehingga mereka akan tergugah ataupun merasa terpanggil dan pada akhirnya mereka akan berpartisipasi secara aktif terhadap setiap program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi politik masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua.

### **2. Manfaat Penelitian**

Secara ilmiah, penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau masukan dalam khasanah bidang pengetahuan, khususnya dibidang ilmu politik yang berhubungan dengan partisipasi politik dan kebijakan pemerintah.

Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti untuk pembangunan politik di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua.

Manfaat lainnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penelitian bagi siapa saja yang akan melanjutkan penelitian dalam bidang partisipasi politik masyarakat dan kebijakan Pemerintah

## **D. Kajian Pustaka**

### **1. Konsep Partisipasi Politik**

Meriam Budiardjo memberikan pengertian tentang partisipasi politik adalah kegiatan seseorang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Publik Policy), kegiatan ini mencakup seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Selanjutnya Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, mengemukakan pula bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

## **2. Konsep Kebijakan Pemerintah**

Kuypers menyebutkan bahwa kebijakan merupakan susunan dari tujuan-tujuan yang dipilih dari para aktor-aktor untuk diri sendiri atau suatu kelompok. kebijakan sebagai tindakan secara sadar dan sistimatis dengan mempergunakan sarana-sarana yang cocok dengan tujuan politik yang jelas sebagai sarana yang dijalankan langkah demi langkah.

Menurut Stoner James, kebijakan merupakan garis pedoman untuk pengambilan keputusan. Kebijakan menetapkan batas-batas di sekitar keputusan, termasuk keputusan yang dapat dibuat dan menolak keputusan-keputusan yang tidak dapat dibuat.

Dengan demikian perkataan atau konsep kebijakan dan pemerintah dapat dipadukan menjadi satu yakni kebijakan pemerintah adalah suatu usaha atau suatu tindakan secara sadar, sistimatis, terorganisir, terencana yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan bersama dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kebijakan pemerintah yang dimaksud disini adalah kebijakan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, seperti kebijakan dalam bidang pertanian, kebijakan dibidang ekonomi, kebijakan dibidang tenaga kerja dan kebijakan dibidang pendidikan merupakan contoh dari kebijakan pemerintah.

## **3. Konsep Peranan Pemerintah**

Menurut Poerwadarminta W. J. S., secara etimologis kata peranan berasal dari kata peran yang artinya: Pemain Sandiwara, tukang lawak. Kata "Peran" ini diberi akhiran "an" maka menjadi "peranan" yang artinya sesuatu yang memegang pimpinan terutarna atau karena hal atau peristiwa.

Jack C. Plano mengemukakan bahwa peranan atau "Role" yaitu seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam, suatu kelompok sosial

## **E. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini digambarkan dengan kalimat menurut kategorinya untuk disimpulkan, apabila ada data yang berupa angka- angka hasil perhitungan akan diproses berdasarkan : dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan hasilnya diprosentasekan.

Instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah kuesioner atau daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan pada variable penelitian. Sedangkan untuk mengumpulkan data sekunder digunakan formulir.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah dan masyarakat yang ada di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua.

Jumlah sampel dalam penelitian ini masing masing diambil 10 responden sehingga jumlah responden keseluruhan dalam penelitian ini adalah 50 orang responden.

## ▪ **PEMBAHASAN**

Pendidikan politik masyarakat pada dasarnya untuk menciptakan suatu keberadaan bangsa yang beradab, dimana dalam pergaulan hidup antar sesama generasi muda sebagai anggota masyarakat terdapat rasa kasih sayang, hormat menghormati, bantu membantu atau tolong menolong, mengetahui akan hak dan tanggung jawab masing-masing menjunjung tinggi hukum, memulakan agama, luhur budinya' Ini karena didukung oleh moral yang luhur dan baik, yaitu Moral Pancasila, dimana tingkah laku lahiriah di dalam masyarakat. Bahwa pendidikan politik, mengandung makna mempertajam nalar seseorang dengan bekal pedoman-pedoman kehidupan sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara yang hidupnya tak terpisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan dunia internasional.

Sasaran luhur yang lain dari pendidikan politik, yakni kesadaran moral yang tumbuh sejak revolusi kemerdekaan yaitu semangat dan nilai-nilai perjuangan hidup bangsa sebagai Pancasila yang menjiwai seluruh masyarakat kita, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur di kawasan nusantara yang damai sejahtera dalam pergaulan bangsa-bangsa yang bersahabat di muka bumi ini

Partisipasi dalam bentuk ide-ide/pemikiran lulus sangat perlu atau lebih banyak masyarakat berikan agar supaya Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dapat secara langsung dirasakan menyentuh apa yang diperlukan masyarakat.

Dalam mengupayakan pelaksanaan pembangunan fisik misalnya maka Pemerintah diharapkan sering memonitoring atau memantau langsung di lapangan untuk melihat keberadaan proyek pembangunan fisik tersebut baik yang dilaksanakan di tingkat kelurahan/desa, Kecamatan, maupun Kabupaten agar Pemerintah selaku aparatur pemerintah daerah yang ada di Kabupaten bisa mengetahui apakah pembangunan tersebut berjalan dengan sebaiknya ataukah tidak.

Peran serta masyarakat pada umumnya tentu tidak akan lepas dari setiap pelaksanaan pembangunan karena tanggung jawab pembangunan tidak hanya semata-mata berada di tangan pemerintah saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat juga, sebab dalam hal ini masyarakat merupakan objek sekaligus subjek daripada pembangunan tersebut.

Dengan demikian maka dibutuhkan keterlibatan, keseriusan dan peran aktif dari seorang Pemerintah sebagai administrator pembangunan dan kemasyarakatan (bila pembangunan tersebut lebih diarahkan pada lingkup Kabupaten) dalam menyukseskan program pembangunan tersebut.

Pengamatan penulis di Kabupaten Tolikara dalam kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan menyangkut judul yang penulis kaji yaitu tentang peranan Pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan, maka sasaran yang penulis lakukan ini untuk melihat tingkat frekuensi peranan pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi Kebijakan untuk peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan, dan Peranan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan hasil interpretasi data, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan Pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif sehubungan dengan penyelenggaraan pembangunan yang diprakarsai langsung oleh pemerintah menunjukkan bahwa yang lebih dominan menjawab pemerintah mampu menggerakkan partisipasi masyarakat. Ini disebabkan karena Pemerintah selalu bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat serta sering memotivasi masyarakat bagaimana memelihara hasil pembangunan yang sudah ada.

## ▪ **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Partisipasi politik yang secara aktif dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Tolikara Provinsi Papua bukan hanya datang dan tumbuh begitu saja, tetapi ada berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah dengan memberikan budaya politik serta pengaruh pendidikan politik masyarakat.
2. Bentuk pemikiran dan ide-ide sebagai perwujudan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tolikara, dinyatakan dengan cara memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini pemerintah sebagai pembuat kebijakan, agar nantinya kebijakan yang dibuat Pemerintah untuk pembangunan daerah, dapat menyentuh sampai kepada lapisan terbawah dari masyarakat
3. Adanya saling mempengaruhi antara kebijakan pemerintah dan partisipasi politik masyarakat sehingga keduanya dapat dilakukan secara seimbang, seiring sejalan serta berlangsung secara
4. Respon yang baik dari masyarakat di Kabupaten Tolikara terhadap proses pembuatan Kebijakan Pemerintah sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan sikap yang secara aktif dalam partisipasi politik mereka

### **B. Saran**

Demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua, maka sangat diharapkan perhatian pemerintah Kabupaten agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya lewat kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran, terutama pada sektor pendidikan secara umum dan khususnya pendidikan politik, sehingga nantinya tingkat partisipasi politik mereka akan semakin tinggi dan lebih baik lagi

## ▪ DAFTAR PUSTAKA

- Anderson James. 1986. *Analisa Kebijaksanaan Publik*, Terjemahan Nuhadjir, Yogyakarta.
- Bayu Suryaningrat, 1980. *Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia*, Bina Aksara.
- Becker H. A. 1972. *Managemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, LP3ES.
- Budiarjo Meriam, 1982. *Partisipasi dan Partai Politik*, Sebuah Bunga Rampai, PT. Gramedia, Jakarta.
- .....1982. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Hoogerwerf A., 1983. *Ilmu Pemerintahan*, Erlangga, Jakarta.
- Huntington, Samuel P dan Joan Nelson, 1981. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Jack C Plano, 1994, *Kamus Analisa Politik*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- James Stoner. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik*.-Editor Nashir Budiman, CV.Rajawali.
- Juwono Sudarsono, 1982. *Politik dan Pembangunan Pilihan Masatah*, CV.Rajawali, Jakarta.
- Kansil C. S. T. 1990. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Kuypers. 1973. *Pengantar Analisis Kebiiaksanaan Negara*, Rineka Cipta.
- Laswell dan Kaplan.1999. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebiiaksanaan Negara*.Bina Aksara.
- Maurice Duverger. 1981. *Sosiologi Politik*. Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.
- Nana Sudjana. 1975. *Teknik Analisis Regresi Dan Koretasi Bagi Para Penetiti*, Edisi Ke dua, Tarsito, Bandung.
- Ndara Taliziduhu, 1987, *Metodologi Pemerintahan Indonesia*, PT,. Bina Aksara, Jakarta.
- Poerwadaminta W. J. S. 1986, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Nasional
- Subagyo Joko. 1991. *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*. Jakarta, Ricka Cipta.
- Suharsimi Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. PT.Bina Aksara, Jakarta.

Sumber lain:

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.